

KEHIDUPAN POLITIK DI KOTA SURAKARTA DAN YOGYAKARTA MENJELANG PEMILIHAN UMUM 1955

Sutiyah

Mahasiswa S3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRACT

The problem of the studied is “Why Surakarta and Yogyakarta during the revolution have different attitudes and fate, but in welcoming the elections of 1955, the political parties are equally vibrant. This study is a historical research with utilizing sources from archives, newspapers, informant, book and previous research. The results of studied showed that the anti-colonialism/imperialism movement, nationalism, anti-feudal and democracy that became the value of the Indonesian revolution had influence to the political situation in Surakarta and Yogyakarta. The anti-feudal/anti swapraja movement in Surakarta brings consequences to the palace had lost to political power and its territory became part of administrative territory of Central Java. Political control is then held by the figure of revolution and political parties which wasn't from the elite of the palace. The opposite of true in Yogyakarta, the rulers palace became the pioneer of the revolution, so there wasn't anti-swapraja movement. Yogyakarta remained as a special region called Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) and the ruler of the palace existed to head of DIY. The attitude of the rulers of the palace and the nobles of Yogyakarta who gave the flexibility of the establishment of the political parties toward the elections, show that they are as a consistent ruler to revolution value, especially erode the feudal culture and to developed democracy, even though society still has a very obedient culture (feudal trait) high against the rulers of the palace and other nobles.

Keywords: Politic, political parties, election.

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji yaitu “mengapa Surakarta dan Yogyakarta yang pada masa revolusi memiliki sikap dan nasib yang berbeda, tetapi dalam menyambut pemilu 1955 partai-partai politik sama-sama semarak”. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan memanfaatkan sumber dari arsip, surat kabar, narasumber, buku dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan anti kolonialisme/imperialisme, nasionalisme, antifeodal dan demokrasi yang menjadi nilai revolusi Indonesia berpengaruh terhadap situasi politik di Surakarta dan Yogyakarta. Gerakan antifeodal/antiswapraja di Surakarta mengakibatkan kraton kehilangan kekuasaan politik dan wilayahnya menjadi bagian dari wilayah administratif Jawa Tengah. Kendali politik selanjutnya dipegang oleh tokoh revolusi dan partai politik yang bukan berasal dari kelompok elite kraton. Hal sebaliknya di Yogyakarta, penguasa kraton menjadi pelopor revolusi, sehingga tidak terjadi gerakan anti swapraja. Yogyakarta tetap sebagai daerah istimewa dengan sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan penguasa kraton eksis menjadi kepada DIY. Sikap penguasa kraton dan bangsawan Yogyakarta yang memberi keleluasaan berdirinya partai politik menyambut pemilu menunjukkan pribadi yang konsisten terhadap tuntutan revolusi, terutama untuk mengikis budaya feodal dan mengembangkan demokrasi, walaupun masyarakat masih memiliki budaya patuh (ciri feodal) yang sangat tinggi terhadap penguasa kraton dan bangsawan lainnya.

Kata kunci: politik, partai politik. Pemilihan umum

Author correspondence

Email: sutiyah61@yahoo.co.id

Available online at <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita>

PENDAHULUAN

Peristiwa yang terjadi di Indonesia pada era dan pasca revolusi, di satu sisi membuat masyarakat bersatu untuk menuju cita-cita mengusir pemerintah kolonial, di sisi lain harus menuai gejolak di berbagai daerah. Hal ini mewarnai suasana perpolitikan di berbagai daerah, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta yang terkenal sebagai masyarakat yang memiliki kultur feodal yang kuat. Dua kota ini mengalami perubahan yang sangat jelas dari suasana tertib berdasarkan kultur yang *adem ayem* menjadi bergolak mengikuti arus zaman. Cita-cita revolusi membawa semangat yang sangat signifikan pada kelompok revolusioner untuk menata kehidupan politik nasional menuju sistem politik dan masyarakat demokratis, menghapus feodalisme dan melenyapkan kolonialisme/imperialisme. Dalam menyikapi tuntutan revolusi terdapat perbedaan antara penguasa kraton di Surakarta dan Yogyakarta. Di Surakarta berusaha untuk mempertahankan *status quo*-nya dan ada *isu* menyambut kedatangan kekuatan kolonial (Belanda) serta masing-masing (Paku Buwana XII dan Mangkunegoro VIII) bekerja sendiri-sendiri, sehingga terjadi gerakan anti swapraja yang mengakibatkan kraton kehilangan kekuasaan politik dan wilayahnya menjadi bagian dari wilayah administratif Jawa Tengah. Hal sebaliknya di Yogyakarta yang menjadi pusat revolusi dan dua penguasa kraton (Hamengku Buwana IX dan Pakualam VIII) bekerja sama dengan solid serta menjadi pelopor revolusi, sehingga tidak terjadi gerakan anti swapraja. Yogyakarta tetap eksis sebagai daerah istimewa dan kota Yogyakarta menjadi pusat DIY serta penguasa kraton tetap menjadi kepada DIY. Raja Yogyakarta tetap sebagai penguasa tradisonal yang menjadi figur yang sangat ditaati, disanjung dan dijunjung tinggi masyarakat. Walaupun begitu, di dua kota ini partai-partai politik sama-sama semarak menyambut pemilu 1955.

Permasalahan yang dikaji adalah mengapa pada masa revolusi Indonesia Surakarta dan Yogyakarta memiliki sikap yang berbeda, tetapi dalam menyambut

pemilu 1955 partai-partai politik sama-sama semarak. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta dan Yogyakarta, dengan batasan waktu masa revolusi sampai menjelang pemilu 1955. Untuk membahas masalah ini diuraikan (1) Situasi politik lokal era revolusi, (2) Kekuatan politik nasional di tingkat lokal, dan (3) berdirinya partai-partai politik. Dari pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan situasi politik di Surakarta pada masa revolusi sampai menyambut pemilu 1955 dan menghasilkan kajian sejarah politik lokal yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, dengan langkah pertama melakukan mengumpulkan sumber. Sumber primer terdiri sumber tertulis dan sumber lisan yang berkaitan dengan keadaan sosial kultural dan politik selama revolusi sampai menjelang pemilu 1955. Sumber tertulis berupa: (1) Arsip yang terdapat di kantor Arsip Nasional Republik Indonesia; (2) Surat Kabar: *Kedaulatan Rakjat*, *Suara Rakjat* dan *Suluh Indonesia*. Sumber lisan dari narasumber. Sumber sekunder berupa buku dan penelitian terdahulu. Langkah selanjutnya adalah mencari kredibilitas dan otentisitas sumber. Kredibilitas sumber dilakukan dengan cara membandingkan isi sumber yang satu dengan sumber yang lain, baik uraian dari sumber tertulis maupun penjelasan dari narasumber. Sedangkan otentisitas sumber dilakukan: (1) Sumber tertulis dengan melihat tahun ditulisnya sumber, ejaan, dan (2) Sumber lisan dengan melihat usia (minimal usia 70 di tahun 2013), kesehatan dan ingatan narasumber. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kajian sejarah politik, antropologi dan sosiologi serta politik, sehingga menghasilkan kajian sejarah politik lokal yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Politik lokal Era Revolusi

Situasi politik di Surakarta dan Yogyakarta pada masa revolusi sangat dipengaruhi

oleh kondisi politik pusat, khususnya berkaitan dengan tuntutan hapusnya kolonialisme/imperialisme, nasionalisme, anti feodalisme dan pengembangan demokrasi. Gerakan anti kolonialisme/imperialisme berimplementasi pada semangat nasionalisme dan gerakan anti feodal berimplementasi pada pengembangan demokrasi (Feith & lance Castles, Eds., 1988: 248).

Tuntutan hapusnya kolonialisme diwarnai perjuangan untuk merebut kekuatan-kekuatan dan pemindahan kekuasaan Jepang ke tangan Republik Indonesia (RI) serta mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Seorang bangsawan dari Pakualaman Yogyakarta, yaitu Ki Hadjar Dewantara bersama murid-murid taman siswa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pada sore harinya mengadakan pawai keliling kota untuk menyambut kemerdekaan (Suwarno, 1994:166; Suhartono, dkk. 2002: 27). Hal sebaliknya terjadi di Surakarta, karena para bangsawan kurang begitu semangat menyambutnya. Penguasa kraton Yogyakarta, yaitu Hamengku Buwana IX bersama Paku Alam VIII tanggal 18 Agustus 1945 mengirimkan telegram ucapan selamat atas terlaksanannya proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada Bung Karno dan Bung Hatta dan Tanggal 19 Agustus mengirimkan telegram ucapan selamat atas terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI serta sanggup berdiri di belakang kepemimpinannya (Moedjanto, 1994: 56).

Suasana menyambut kemerdekaan di Surakarta dan Yogyakarta, di satu sisi dengan perjuangan mengusir tentara Jepang, di sisi lain segera mengikuti kebijakan pemerintah RI yang salah satu di antaranya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Perjuangan heroik mengusir tentara Jepang terjadi di Gedung Agung Yogyakarta untuk mengibarkan bendera merah putih menggantikan bendera Nippon. Perjuangan di Surakarta ditunjukkan dengan menurunkan Bendera Nippon yang berki-

bar di kantor pemerintahan, diganti Bendera merah putih (Soeyatno, 1978: 53).

KNID Yogyakarta dibentuk tanggal 24 Agustus 1945 yang anggotanya dipilih untuk mewakili kaum nasionalis, sosialis, kelompok-kelompok keagamaan, kaum tani, buruh, organisasi pemuda dan wanita serta tokoh terkemuka pemerintahan setempat. Dari 83 anggota KNID terdapat nama-nama yang menggunakan gelar kebangsawanan, yaitu Ir. K.R.T. Dipokusumo, K.R.T. Honggowongso, R.P. Sudarsono, K.R.T. Harjodiningrat, K.R.T. Josodiningrat, P.B.H. Hadinegoro, B.R.M. Sukadari, Mr. K.P.H. Sudarisman Purwokusumo, K.P.H. Nototaruno, R. Atmodarminto, Mr. K.R.T. Broto kusumo, K.R.T. Martohusodo, R. Mawai Hardjosubroto, R. M. Sumarmadi, K.R.T. Notojudo, K.R.M.T. Surjaningrat, R.M. Sosrosudirdjo, R. Sugardo dan R. Darmosugito (Suratmin, 1991: 70).

KNID Surakarta dibentuk pada awal bulan September 1945 (Soeyatno, 1978: 53) dengan ketuanya K.P.H. Mr Sumodiningrat, dibantu 9 orang yang yang berasal dari elit agama, elite tradisional berpendidikan Barat dan elit politik, yaitu Dr. Kartono, R.H.S. Wongsodinomo, Abdul Mufti, R Hadiprijono, Sunarto Kusumodihardjo, K.G.P.H. Suryohamijoyo, Suyono, Sumarno, Sutosundoro dan Setiyadikusumo. Sumodiningrat (ipar Paku Buwana XII) dipilih sebagai ketua KNID bukan karena ia seorang bangsawan revolusioner yang mewakili Kasunanan, melainkan seorang perwira Pembela Tanah Air (PETA) yang oleh tokoh-tokoh politik dipandang mampu mengambil alih kekuasaan Jepang (Soeyatno, 1978: 53). KNID Surakarta tanggal 30 September 1945 berhasil memaksa para pembesar Jepang (di bawah pimpinan Watanabe) untuk menyerahkan kekuasaannya (Soeyatno, 1978: 53).

Perjuangan menghapuskan feodalisme dan mengembangkan demokrasi terdapat perbedaan antara Yogyakarta dengan Surakarta. Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia dari tahun 1946-1950, sehingga menjadi pusat revolusi

si yang memelopori terjadinya perubahan-perubahan politik dan sosial yang menjalar ke seluruh Indonesia. Sultan Hamengku Buwana IX sebagai raja Yogyakarta adalah negarawan demokrat dan pelopor perubahan sosial itu yang sekaligus memainkan peranan penting dalam memelihara stabilitas masyarakat yang sedang berubah (Soemardjan, 1991: 6) Sultan Hamengku Buwana IX telah mengikis kekuasaan dan keistimewaan para bangsawan dan berusaha membaurkan para bangsawan dengan rakyat jelata. Kebijakan ini memang membuat sebagian bangsawan kecewa, tetapi mendapat dukungan kuat dari tuntutan jamannya. Walaupun begitu orang tetap hormat dan taat pada Sultan, bahkan SK Trimurti menyatakan bahwa rakyat sangat fanatik terhadap rajanya. Semua permintaan atau perintah asalkan mengatas-namakan *Ngarso Dalem*, rakyat dengan senang hati melaksanakan, apapun resikonya (Atmakusumah, 2011: 259).

Kondisi sebaliknya terjadi di Surakarta, Paku Buwono XII tidak mewarisi sosio magis orang tuanya dan tidak mempunyai pengalaman dalam mengurus masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum, kurang memiliki watak yang serius dan keberanian untuk mengambil keputusan serta tidak memahami kekuatan-kekuatan revolusi yang sedang bergerak ke arah demokrasi Barat dan kedaulatan rakyat (Soemardjan, 1991: 73). Realitas ini disertai dengan tidak adanya kerjasama dari dua penguasa kerajaan membuat Surakarta terjadi kekacauan yang parah dan menuntut hapusnya kekuasaan raja (gerakan anti swapraja).

Pindahannya ibu kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap situasi di Surakarta, karena personil oposisi dan partai-parai politik serta badan perjuangan yang berjumlah ribuan ikut pindah (Anderson, 1972: 262-263). Kelompok oposisi memusatkan kegiatannya di kota Surakarta, terutama yang berada dalam kelompok Tan Malaka mempolitisir situasi di Surakarta (Yulianto, 2000: 63-64), sehingga gerakan anti swapraja

merasa mendapat angin segar, menjadi makin kuat dan meluas. Raja Surakarta terutama Sunan percaya akan pulihnya kekuasaan Belanda, sehingga perjuangan nasional menjadi satu dengan perjuangan anti feodal (Anderson, 1972: 348-352).

Gerakan anti feodal meluas menjadi aksi massa yang didukung oleh partai-partai politik dan badan perjuangan. Kesatuan Barisan Banteng (BB) menculik Sunan, Kanjeng Ratu dan Soerjohamidjojo pada bulan Januari 1946 (Anderson, 1972: 351) menuntut agar Sunan bersedia disejajarkan dengan pemimpin rakyat lainnya dengan panggilan "Bung". (Yulianto, 2000: 76-77). BB kembali beraksi memaksa Sunan agar bersedia melepaskan semua kekuasaan politiknya dan bergabung dengan pemerintah RI serta mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran apabila Sunan tidak bersedia menerima usulan ini tanggal 24 April 1946. Hal yang sama juga terjadi di Mangkunegaran (Yulianto, 2000: 78-79). Pegawai pemerintahan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Kasunanan dan Mangkunegaran dan menyatakan sebagai pegawai pemerintah RI (Suyatno, 1984: 67)

Gerakan anti swapraja mencapai sukses tanggal 15 Juli 1946 ketika pemerintah Pusat RI mengeluarkan UU No. 16/SD/1946 yang memutuskan bahwa daerah Surakarta menjadi daerah Karesidenan di bawah seorang Residen dan merupakan bagian dari wilayah RI (Suyatno, 1984: 67). Menteri Dalam Negeri melalui keputusan tanggal 3 Maret 1950 menyatakan bahwa wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran secara administratif menjadi bagian dari propinsi Jawa Tengah (Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 jilid 2, No. 938). Jadi *status quo* pemerintah kerajaan di Surakarta telah dihapuskan.

Keluarnya UU No. 16/SD/1946 tidak menghentikan kekacauan politik di Surakarta. Suasana politik di Surakarta diperparah oleh politik nasional. Peristiwa demi peristiwa yang sangat menakutkan terjadi, seperti penembakan Tentara Laut

Republik Indonesia (TLRI) yang berpihak pada Amir Sjarifuddin terhadap Asrama Siliwangi (hijrah) di jalan Srumbatan (dikenal dengan peristiwa Srumbatan) tanggal 13 September 1948, kemudian diikuti pertempuran-pertempuran lain yang tersebar di kota Solo (Soejatno, 1978: 53; Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953: 12). Atas peristiwa ini Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 17 September 1948 menyatakan Solo dalam keadaan bahaya.

Suatu hal yang tidak kalah penting di era revolusi dan berpengaruh pada suasana politik menjelang pemilu adalah pemuda, baik mereka yang mendapat pendidikan Barat (Sutherland, 1973: 115) maupun yang tidak (mereka banyak yang mendapat pendidikan di Pondok Pesantren yang telah menjalani tempaan fisik dengan *mutih, ngrowot, nguler dan patigeni* (Soejatno 1982: 74-76). Sebaliknya orang-orang kraton Surakarta tidak begitu berperan dalam percaturan politik bahkan mulai tersingkirkan. Sebagai contoh selain Sumodiningrat yang terpilih untuk memimpin KNID bukan karena ia seorang bangsawan revolusioner melainkan seorang perwira PETA (Suyatno, 1984: 66-68), yang terpilih sebagai komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) adalah Sutarto, seorang pemuda PETA, pendiri Ikatan Prajurit Sejati (IPTAS) dan Angkatan Muda Tentara (AMT), bukan G.P.H. Purbonegoro, meskipun beliau seorang cendekiawan Kasunanan lulusan akademi militer (Breda) Belanda (Suyatno, 1984: 67; Anderson, 1972: 355).

Para pemuda yang pada masa pendudukan Jepang (melalui organisasinya *Suishintai* atau Barisan Pelopor) telah dijalinan hubungan antara kelas atas dengan kelas bawah, terutama orang-orang miskin di pinggir-pinggir kota dan di pondok pesantren di luar perbatasan kota, menimbulkan kekuatan massa, solidaritas, persaudaraan dan nasionalisme baru yang berbeda dari nasionalisme senior mereka (Anderson, 1972: 30-31; Lucas dalam Wild dan Peter Carey, 1986: 161-162). Status sosial orang perjuangan tam-

pak menonjol di era revolusi (Soejatno 1982: 52). Para pemuda yang masuk sebagai pejuang merasa bangga, karena selain merasa memiliki peran yang sangat berharga bagi bangsa dan Negara, mereka juga dapat bekerja sama dan bersama-sama kelompok masyarakat senasib, artinya mereka merasa eksis dalam masyarakat pada zamannya (Wawancara dengan Suhardi, tanggal 7 Januari 2014). Salah satu contohnya adalah penghormatan kepada pemuda yang bernama Arifin yang gugur pada waktu menyerang markas *Kenpei Tai* di Timuran tanggal 13 Oktober 1945. Ribuan penduduk tua dan muda, laki-laki dan perempuan menyampaikan penghormatan terakhir dan mengantarkan jenazah sampai di pemakaman Astana Purwoloyo (Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953: 54). Daerah pertempuran ini diabadikan sebagai nama jalan, yaitu jalan Arifin.

Para pemuda pejuang dalam revolusi fisik, terutama yang telah mengenyam pendidikan formal pada masa pemerintahan Hindia Belanda banyak yang masuk dalam partai politik pada tahun 1950-an (Sutherland, 1973: 115) bahkan ikut menentukan percaturan politik Indonesia. Mereka yang menjadi kader dari suatu partai politik akan lebih bangga lagi, karena merasa ikut berperan dalam perjuangan mencapai tujuan, yaitu mengemban cita-cita revolusi khususnya mengembangkan demokrasi (Wawancara dengan Suhardi, tanggal 7 Januari 2014). Salah satu realisasi dari nilai demokrasi adalah dibentuknya Badan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 8 tahun 1946, di Surakarta dan Yogyakarta diadakan Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) (Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 jilid 2, No. 906). Sesuai dengan Penetapan pemerintah No. 8 tahun 1946 pemerintah di daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta dan pasal 8 ayat (1) Perpu No. 8 tahun 1946 bahwa BPRD berjumlah 50 orang, yang berasal dari unsur yang mewakili partai-partai politik, gabungan badan perjuangan, organisasi wanita,

organisasi pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat (Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta, 1977: 56).

Berdasarkan Penetapan pemerintah No. 8 tahun 1946 dan pasal 8 ayat (1) Perpu No.8 tahun 1946, di Surakarta keluar SK Residen Surakarta tanggal 7 Agustus 1946 No. 6 tentang dibentuknya BPRD Kota Surakarta. Anggota BPRD berasal dari Masyumi (6 orang) PNI (5 orang), Parkindo (2 orang), P.K.R.I (2 orang), PBI (5 orang), Kowani (2 orang), G.L.P.S. (2 orang), Partai Rakyat (2 orang), Kongres Pemuda (2 orang), P.K.I. (3 orang), Partai Sosialis (3 orang) dan ditunjuk 16 orang (Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953: 32). Dari 16 orang yang ditunjuk hanya seorang yang menggunakan gelar kebangsawanan, yaitu G.P.H. Hadinegoro (Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953: 31). Dengan demikian usaha untuk membersihkan jabatan penting dari unsur feodal begitu keras. Kondisi sebaliknya di Yogyakarta, karena nasib bangsawan tidak seburuk yang terjadi di Surakarta. Kalangan bangsawan banyak yang masih menempati jabatan penting. Misalnya Walikota Yogyakarta dijabat oleh K.P.H. Soedarisman Poerwokoesoemo. Pengurus Persatuan Pamong Pradja Jogjakarta (PPPJ) semua berasal dari kalangan bangsawan, yaitu Ketua: R.P. Prodjowitjoro, Wakil Ketua: R. Ng. Prodjohandoko, Penitera: R.P. Prodjoseputro, Bendahara: R.P. Prodjokoesoemo, Pembantu: R. Ng. Pontjodihardjo (*Kedaulatan Rakjat*, 4 Mei 1946: 2).

Dihapuskannya kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran juga membawa konsekuensi yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah Kota, Karésidenan Surakarta, propinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Sebaliknya Swapraja Yogyakarta terus bergerak sejalan dengan tuntutan revolusi. Hamengku Buwana IX mengurangi kekuasaannya dan membagi dengan wakil rakyat (DPRD). Anggota DPRD sudah diagenandakan untuk dipilih melalui pemilu. Suasana politik yang makin matang dan kondusif di Yogyakarta memungkinkan di-

laksanakannya pemilu untuk lebih menciptakan suasana demokratis. Pemilu yang akan diselenggarakan untuk memilih anggota DPRD sudah mendasarkan pada partai politik.

Kekuatan Politik Nasional Di Tingkat Lokal

Kekuatan politik nasional dipengaruhi oleh lima aliran pemikiran politik, yaitu nasionalis radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokrat dan komunisme (Feith and Lance Castles, Eds. 1970: 13). Aliran pemikiran politik nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa dan sedikit sosialisme demokratis melekat pada Partai Nasional Indonesia (PNI). Aliran pemikiran komunisme dan dipengaruhi pemikiran barat melekat pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai-partai Islam, terutama Majelis Syuro Muslimin (Masyumi) dan Nahdlatul Ulama (NU) melekat aliran pemikiran Islam, hanya saja Masyumi lebih banyak dipengaruhi aliran pemikiran barat, sedang NU banyak dipengaruhi aliran pemikiran tradisionalisme. NU merupakan partai dengan basis Islam tradisional dengan massa yang berasal dari kalangan santri pedesaan (Ahmad, 2016:55). Partai sosialis Indonesia melekat aliran pemikiran sosialisme demokrasi (Haryanto, 1991: 39-46).

PNI memperoleh dukungan dari *elite* tradisional Jawa berpendidikan dan berkat Marhanisme serta figur Bung Karno mendapat dukungan lapisan bawah (Islam nominal). Selama revolusi partai ini berkembang luas dan mendapat dukungan dari elite administrasi dan petani abangan di Jawa (Ahmad, 2016: 54). PKI mendapat dukungan mayoritas dari non santri terutama massa pedesaan. Masyumi di Jawa dikenal kosmopolitan, kekotaan dan suka berdagang, sehingga mendapat dukungan dari Muhammadiyah atau santri di perkotaan, sedang NU dikenal bersifat pedesaan dan banyak dipengaruhi unsur kejawaan, sehingga mendapat dukungan santri dari pedesaan. PSI mendapat dukungan dari kalangan yang sudah mengenyam pendidikan barat

non santri dan kurang mendapat dukungan kalangan massa pedesaan (Haryanto, 1991: 39-46).

Pendukung dari masing-masing ideologi berpegang teguh pada pendiriannya, sehingga mereka saling mencaci dan menjelekkan serta mencari kelemahan pihak lain dan mengunggulkan alirannya. Misalnya PNI memiliki kebangsaan sebagai dasar utama untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, maksudnya suatu *nationale staat* yang artinya ada persatuan antara orang dan tempat serta tidak mendasarkan pada agama, suku atau golongan (Feith and Lance Castles, Eds. 1970: 16-17; Muchtarom, 1988: 49). PNI mengecam aliran agama (Islam), dengan menyatakan bahwa bangsa Indonesia memang mayoritas (99 %) beragama Islam, tetapi Islam belum hidup yang sesungguhnya di kalangan rakyat, karena ajaran Islam baru di atas bibir pemeluknya saja (Feith and Lance Castles [Eds.] 1970: 21; Muchtarom, 1988: 51). Oleh karena itu, di Indonesia belum dapat diterapkan hukum-hukum Islam. Kelompok Islam menentang kelompok sekuler dan abangan yang mementingkan keduniawian dan mengesampingkan keakheratan. Masyumi menyatakan bahwa dalam hubungan sesama manusia dan negara lain, bidang usaha (ekonomi) dan bertindak serta peraturan hukum, semua harus bersendikan pada hukum dan ajaran Islam (Sardjan, 1947: 5-16). Menurut Islam, dasar kebangsaan dan sekuler hanya mengejar keduniawian, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan lepas dari nilai etika dan moral. Oleh karena itu, pembinaan ahlak dan moral bangsa harus ditegakkan melalui syariat Islam (Sardjan, 1947: 5-16).

Persatuan pendukung aliran pemikiran yang begitu kuat juga menampakkan sebagai suatu konflik besar. Konflik politik di Indonesia tahun 1950-1957 terlihat pada persaingan dan pegangan ideologi dari partai-partai politik, terutama yang dikategorikan partai besar. Konflik utama antara PKI dengan Masyumi diwarnai kuat oleh nilai-nilai agama, karena Masyumi sebagai partai agamis sedang

PKI yang menganut Komunis dituduh sebagai ateis, sehingga keduanya terlihat berbeda secara kontras. Konflik antara PNI dengan Masyumi terjadi karena PNI sebagai partai beraliran nasional sekuler, sedangkan Masyumi bersifat agamis (Poerwantana, 1994: 49). Perbedaan pandangan dari ideologi masing-masing (PNI-Masyumi, Masyumi-PKI) inilah yang menjadi akar konflik. Kampanye pemilu dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa antara PNI, PKI dan Masyumi saling mencela dan menjelek-jelekan. NU dapat bekerja sama dengan PNI dan PKI (Poerwantana, 1994: 47-48), sehingga hubungannya cukup baik. NU justru kadang-kadang kesulitan menjalin hubungan baik dengan Masyumi karena perbedaan pandangan, walaupun keduanya mendasarkan pada budaya Islam. Pandangan terhadap Islam dari Masyumi sering diklasifikasikan modernis sedang NU dianggap ortodok (Rauf, 2000: 117; *Kedaulatan Rakjat*, 27 Oktober 1955: 3). NU keluar dari Masyumi tanggal 31 Juli 1952 dan berdiri sebagai partai sendiri tanggal 30 Agustus 1952 (Poerwantana, 1994: 47).

Partai-partai politik yang telah memiliki pijakkan terus bergerak meluas dengan mengadakan berbagai kegiatan. Rapat-rapat besar dan kecil (biasa) dilakukan dan lebih gencar dalam suasana politik yang hangat pada masa kampanye pemilu 1955. Partai-partai politik mencari dukungan dengan membentuk panitia aksi dan pengurus cabang di kota-kota kecil dan desa-desa. Partai-partai politik juga memperbanyak organisasi masyarakat meliputi buruh, tani, pemuda, wanita, pelajar, pemuka dan berbagai perkumpulan budaya, olah raga, sosial yang meluas di kota-kota kecil dan desa-desa di seluruh Indonesia, (Feith and Castles [Eds.] 1970: xlvii) termasuk di Surakarta dan Yogyakarta.

Kekuatan tiga aliran politik pusat yang berjuang untuk mendapat pengaruh mempunyai konsekuensi pada cabang cabang partai. Partai pendukung masing-masing aliran begitu gesit bergerak ke daerah-daerah untuk mencari dukungan.

Pengaruh tiga aliran politik itu tampak jelas di Surakarta dan Yogyakarta, yaitu hadirnya sebutan kelompok *wong abang*, *wong ijo* dan *wong ireng*. *Wong abang* terdiri dari pendukung komunisme (PKI dan BTI), *wong ijo* merupakan pendukung Islam (NU dan Masyumi) dan *wong ireng* menjadi pendukung nasionalis (PNI) (Kartodirdjo, 1982: 151-153).

Partai politik ada yang tetap aktif, baik di pedesaan maupun di perkotaan yaitu PKI. PKI tidak berusaha agar orang tertarik untuk menjadi anggota, tetapi berusaha menciptakan landasan untuk masa pengikutnya di kemudian hari. Misalnya mendirikan lembaga Marx (*Marx House*) dengan menggunakan rumah besar milik pemimpin pabrik gula di Padokan. Marxisme diajarkan oleh anggota partai, dibicarakan dengan para pendengar dan menganalisis masalah politik yang sedang hangat secara Marxis. Lembaga ini terbuka bagi siapa saja yang berminat dan bergabung. Lembaga dibuka selama 2 bulan dan berhasil memenuhi kebutuhan mendesak tentang pendidikan politik masyarakat. PKI juga mengadakan kursus dalam bidang politik dan teknik berorganisasi di berbagai tempat di mana terdapat anggota komunis yang aktif (Soemardjan, 1991: 146). BTI giat melakukan ceramah dan mendiskusikan teori-teori serta melakukan propaganda untuk menarik simpati rakyat. Seperti mengadakan rapat raksasa dan demonstrasi terhadap bupati dan Badan pekerja KNI pusat di kota yang mengakibatkan dihapuskannya "hak-hak konversi" dengan Undang-Undang No. 13 tanggal 26 April 1948. BTI segera membagi-bagikan poster dengan dua kata kemenangan "Konversi: Goal" setelah UU itu keluar (Soemardjan, 1991: 147).

PNI sejak tahun 1946 berhasil mengembangkan diri dengan menarik partai-partai nasionalis daerah, seperti Serikat Nasional di Bangka, Pertuan Nasional di Kalimantan Selatan, Ikatan Nasional di Kalimantan Timur, Gerindo di Gorontalo dan Persatuan Nasional di Sumbawa untuk menggabungkan diri (Kementerian Penerangan RI, 1951: 110; Karim, 1983: 79; Sjamsuddin, 1984: 3). Selanjutnya

PNI memperluas aktivitasnya dalam bidang organisasi massa, misalnya Pemuda Demokrat (yang kemudian dikenal Gerakan Pemuda Marhaen), Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (yang dikenal dengan Kesatuan Buruh Marhaenis), Wanita Demokrat (Gerakan Wanita Marhaenis) dan BTI (Persatuan Tani Nasional Indonesia/Petani) (Sjamsuddin, 1984: 3-4).

Masyumi membentuk Komite Aksi Pemilihan Umum (KAPU) Pleno DIY, cabang, anak cabang dan ranting putra putri yang akan bekerja untuk mensukseskan kemenangan partai pada pemilu (*Kedaulatan Rakjat*, 31 Mei 1955: 2). Organisasi pemuda Masyumi, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Yogyakarta membentuk pengurus cabang dan ranting di seluruh DIY (*Kedaulatan Rakjat*, 1 Juni 1955: 2). Organisasi pemuda PNI Pemuda Rakyat membentuk cabang sampai ke ranting-ranting. (*Kedaulatan Rakjat*, 4 Juli 1955: 2). Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) cabang Yogyakarta di Poncowinatan membentuk pengurus baru periode 1955-1957 dengan susunan L.A. PSII cabang Yogyakarta terdiri atas S M. Aseni (ketua), Abdullah Amien (wakil ketua), A.R. Aidit (Sekretaris), sedang D.A. PSII cabang Yogyakarta adalah Tjokrodihardjo (ketua), Ronodibroto (wakil ketua), S. Wisnubroto (Sekretaris) (*Kedaulatan Rakjat*, 14 Juli 1955: 2). Pemuda Kristen di Surakarta pada konferensi yang dihadiri 10 perkumpulan dan organisasi pemuda Kristen di Surakarta bulan Juli 1955 membentuk sekretariat terdiri dari 7 orang (*Kedaulatan Rakjat*, 20 Juli 1955: 2).

Pemuda Islam Indonesia (PII) cabang Kota Yogyakarta pada rapat tanggal 19 Juni 1955 membentuk Biro Pemilihan Umum (BPU) dengan susunan pengurus: Abdul Latif Abidin (ketua), Ach. Budairi (wakil ketua). Muhamad Umar dan Marzuki Wachid sebagai sekretaris, serta Uswatun Chasanah, Astuti, dan Ali Rahmad di bagian keuangan. Ada beberapa bagian, yakni bagian aksi: Hasan Basri dan Ismail Djalili. Bagian penerangan: Rahmat dan Ach. Suhardjo B. Mt. Ala-

mat BPU cabang kota Yogyakarta di jl. Tidar 2 Yogyakarta (*Kedaulatan Rakjat*, 21 Juni 1955: 2). PKI membentuk Panitia Aksi Pemilihan Umum (PAPU).

Pembaharuan pengurus yang dilakukan, misalnya PNI ranting Mantrijeron, dalam peringatan 28 tahun berdirinya PNI tanggal 17 Juli 1955 memperbaharui pengurus yang diketuai Tjokrodihardjo dan penulis Chatib Pramuhardjono (*Kedaulatan Rakjat*, 20 Juli 1955: 2). PKI dalam kongres ke-5 memilih anggota presidium: Alimim (angkatan 1926), Achmadsumedi (angkatan 1935), Aidit (angkatan anti fasis-Jepang), Njono (angkatan revolusi), K Supit (angkatan jalan baru) dan mengangkat Malenkov dan Mao Tse Tung sebagai anggota presidium kehormatan (*Suara Rakjat*, 18 Maret 1955: 1). Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dalam kongres tanggal 1-3 September 1955 mengambil keputusan susunan Pengurus Besar Baru yang terdiri dari Ketua Umum Mr. Jusuf Wibosono, Wakil Ketua I dan II Mr. Daljono dan Mochtar Gozali, Sekretaris Jenderal S. Narto (*Kedaulatan Rakjat*, 5 September 1955: 1).

Mencermati pengaruh tiga besar aliran pemikiran politik dan bermunculannya partai politik di Surakarta dan Yogyakarta, baik yang sejak awal berdiri maupun cabang dan ranting partai, menandakan besarnya tingkat antusias masyarakat dalam politik tahun 1945-1955, tetapi sambutan berdirinya partai politik tidak dibarengi dengan pemahaman yang tinggi oleh masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Sebagian besar masyarakat Surakarta Yogyakarta belum mamahami makna, ideologi dan tujuan dari suatu partai politik serta ke mana mereka mau dibawa setelah masuk dalam suatu partai politik. Salah satu partai nasional, yaitu PNI menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih kurang dalam pengetahuan tentang politik, maka PNI berkewajiban menyebar-luaskan pengetahuan ini kepada masyarakat luas (*Suluh Indonesia*, 24 Agustus 1955: 1).

Para politisi secara umum mengakui bahwa hanya segolongan kecil masyarakat

atau hanya orang khusus yang telah memahami dan menjadikan tujuan hidup segala macam ideologi (Islam, Nasionalisme, sosialisme dan komunisme), baik dalam menegakkan masyarakat maupun dalam membangun negara. Rakyat umum belum memahami *isme-isme* itu dan belum dapat membandingkan antara yang satu dengan yang lain, termasuk mengoreksinya. Selo Soemardjan (1991: 145-154) menjelaskan bahwa Partai politik masih dikatakan tidur dengan kepala tanpa badan, kecuali PKI dan Ormas-ormasnya. Rakyat mengetahui partai politik hanya sekedar dari namanya saja yang diidetifikasikan dengan orang yang menjadi ketua atau para aktivisnya. Rakyat umum hanya ingin hidup dalam keadaan lebih baik, maka siapaun atau partai manapun yang mengaku dapat memenuhi hajat hidup dan keinginan itu ialah yang dapat sanjungan dan pujaan. Rakyat hanya ingin hidup senang, dalam arti kehidupan ekonominya lebih baik, setidaknya bisa mencukupi kebutuhan minimal atau sekedar memenuhi kebutuhan subsisten, tidak tahu harus menegakkan negara keagamaan atau kebangsaan (*Kedaulatan Rakjat*, 27 Oktober 1955: 3).

Narasumber hampir semua mengatakan bahwa secara umum masyarakat tidak memahami partai politik, apa yang diperintahkan panutannya diikuti begitu saja atau sekedar ikut teman atau tetangga. Mereka hadir pada rapat-rapat umum yang diselenggarakan oleh partai politik manapun sekedar melihat sesuatu yang jarang bahkan tidak atau belum pernah mereka lihat dan terutama ingin melihat hiburan yang ditampilkan partai politik untuk menghibur pegunjung. Jadi mereka datang dalam rapat partai politik sekedar sebagai pegunjung, tidak memandangi partai apa yang menyelenggarakan. Pegunjung akan datang dalam jumlah yang sangat besar apabila mendatangkan tokoh terkenal. Bung Karno (Presiden) adalah salah satu dari sekian banyak tokoh nasional yang paling dikenal dan populer, sehingga setiap acara rapat yang menghadirkan beliau mendapat sambutan

sangat besar dari masyarakat (Wawancara dengan Sudjono tanggal 22 Desember 2013; Suwito, P.H tanggal 30 Desember 2013; Slamet Mulyono, tanggal 13 Maret 2014; Sutantiyo tanggal 2 September 2014; Maryanto tanggal 6 September 2014; Sapuan Gafar tanggal 21 September 2014).

Di samping itu, masyarakat menghadiri suatu rapat yang diselenggarakan partai politik karena patuh pada tokoh atau pimpinan massa, rasa sentimen yang tinggi atas kelompok atau sukunya (Himawan, 1992: 34) atau janji yang memikat. Misalnya para santri patuh perintah dari Kiai. Hubungan santri-kiai dalam masyarakat memiliki ikatan yang sangat kuat, sehingga apapun yang diperintahkan sang kiai, dilaksanakan oleh santri dengan sepenuh hati. Sentimen marhaen memiliki ikatan yang sangat kuat, apalagi kata marhaen telah mampu mengikat masyarakat dengan tokoh yang populer, yaitu Bung Karno. Kelompok ini merasa memiliki nasib yang sama dan akan berjuang untuk membebaskan mereka dari kemiskinan yang telah lama diderita (Soenario, 1988: 38; Sukarno, 1965: 286). Istilah marhaen yang diucapkan Sukarno betul-betul menyentuh hati kaum miskin di seluruh Indonesia, sehingga orang mendengar kata marhaen pasti ingat Sukarno (Bung Karno).

Pelajar dan mahasiswa banyak yang tidak memperhatikan partai politik. Bagi mereka yang penting sekolah dengan prestasi sebaik-baiknya hingga studinya berhasil (Wawancara dengan Warkitri tanggal 30 Nopember 2013; Sri Sudarni tanggal 4 Desember 2013; Setyo Mahanani tanggal 21 Desember 2013; Sudjono tanggal 22 Desember 2013; RM Tirun Marwito SH/Pangeran Jatiningrat 24 Desember 2013; Daryono Sutoyo tanggal 9 Januari 2015; Marselinus Subari tanggal 25 Pebruari 2014; Hadi S Topobroto tanggal 12 Maret 2014). Para guru di sekolah juga tidak berusaha mempengaruhi murid untuk masuk partai politik tertentu, bahkan menyinggung pun tidak, sehingga komitmen menjadi guru cukup besar dan mereka masih lugu (Wawancara dengan War-

kitri tanggal 30 Nopember 2013; Sudjono tanggal 22 Desember 2013; Djoko Suryo tanggal 24 Desember 2013; Daryono Sutoyo tanggal 9 Januari 2015).

Janji partai politik yang paling menyentuh masyarakat, misalnya janji partai agama yang menyatakan apabila seseorang mengikuti partainya akan masuk surga, walaupun janji ini tidak akan mampu menyentuh hati kaum sekuler. Bagi kaum agamis, hidup di dunia hanya untuk mengejar kehidupan selamat di akherat (masuk surga). Orang yang mengejar hidup keduniawian hanya selamat hidup di dunia, tetapi orang yang mengejar hidup di akherat akan selamat di dunia dan di akherat. Janji PKI dengan semboyannya "sama rata sama rasa" akan membagikan tanah pada rakyat sangat tepat sekali untuk massa bawah pada masa itu, karena harapan massa bawah untuk bisa melepaskan kemiskinannya adalah dengan memiliki tanah. Janji PKI cukup ampuh untuk memikat rakyat, sehingga massa bawah memilih PKI bukan karena memahami ideologi partai, tetapi karena menganggap PKI-lah yang akan memberi sesuatu yang sangat ia butuhkan, yaitu kepemilikan atas tanah (Wawancara dengan Sudjono tanggal 22 Desember 2013; Kunto Wibisono Siswo Mihardjo tanggal 3 Januari 2014; Suhardi tanggal 7 Januari 2014).

Partai-Partai Politik

Perjuangan mengembangkan dan menyempurnakan demokrasi dapat terlaksana sangat erat kaitannya dengan sistem politik suatu negara, artinya apakah sistem politik memungkinkan negara untuk memberi kesempatan berkembangnya sistem kepartaian (Rahardjo [Ed.], 1996: 5 dan 18). Sistem politik juga sangat menentukan berperan atau tidaknya partai politik dalam kehidupan politik suatu negara. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 3 Nopember 1945 yang intinya pemerintah mengizinkan pembentukan partai politik merupakan contoh sistem politik negara yang memberi kesempatan berkembangnya sistem kepartaian, karena sejak itu setiap kelompok kepentingan ber-

lomba-lomba untuk mendirikan partai politik (Rahardjo [Ed.], 1996: 21-23).

Kelompok-kelompok yang tanggap terhadap partai politik di Surakarta dan Yogyakarta pada umumnya adalah kelompok yang di masa lalu mempunyai hubungan dengan partai. Penerimaan anggota partai akan lebih cepat jika calon mempunyai status sosial lebih tinggi dan kedudukan resmi dari orang yang akan direkrut. Partai politik dapat tumbuh besar karena kegiatan-kegiatan anggotanya, bukan karena orang luar yang ingin masuk atas dasar kemauan sendiri. Partai politik membutuhkan penduduk, tetapi penduduk tidak begitu menyadari kalau membutuhkan partai politik (Sumardjan, 1991: 139-143).

Partai-partai politik yang berdiri setelah adanya maklumat wakil presiden tanggal 3 Nopember 1945 adalah (1) Masyumi tanggal 7 Nopember 1945, dipimpin oleh Sukiman Wiryoanjojo; (2) PKI tanggal 7 Nopember 1945 dipimpin oleh Moh. Yusuf; (3) Partai Buruh Indonesia (PBI) tanggal 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Nyono; (4) Partai Rakyat Jelata tanggal 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Sutan Dewanis; (5) Partai Kristen Indonesia (Parkindo) tanggal 10 Nopember 1945 dipimpin oleh Ds. Probowinoto; (6) Partai Sosialis Indonesia (PSI) tanggal 10 Nopember 1945 dipimpin oleh Amir Syarifuddin; (7) Partai Rakyat Sosialis (PRS) tanggal 20 Nopember 1945 dipimpin oleh Sutan Syahir. PRS dan PSI bulan Desember 1945 bergabung menjadi Partai Sosialis yang dipimpin oleh Sutan Syahir, Amir Syarifuddin dan Oei Hwee Gaot; (8) Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI) bulan Desember 1945 dipimpin oleh I.J. Kasimo; (9) Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh J.B. Asaa, dan PNI tanggal 29 Januari 1946 dipimpin oleh Sidik Joyosukarto (Sekretariat Negara. 1981: 56).

Partai-partai setelah mempunyai landasan yang kuat, barulah terjadi kesibukan melakukan propaganda ke semua pihak untuk mendapatkan pengikut. Ketika pemerintah RI pindah dari

Jakarta ke Yogyakarta bulan Januari 1946, semua badan partai politik tingkat pusat juga pindah. Partai-partai politik berusaha melebarkan sayapnya, baik di dalam maupun di luar kota. Aktivitas yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah membentuk pengurus cabang dan memperbanyak ormas (Feith and Castles [Eds.] 1970: xlvii). Cabang-cabang partai dan partai-partai baru bermunculan di Yogyakarta, tetapi semuanya hanyalah sekelompok kecil orang yang terdiri dari ketua dan para pembantunya. Partai-partai telah membentuk pengurus cabang dan ranting-ranting, tetapi tidak menyentuh bahkan tidak dikenal masyarakat luas (Soemardjan. 1991: 145).

Partai-partai politik pada masa revolusi menjadi makin semarak dengan berdirinya laskar, seperti Laskar Rakyat, BB, *Sabilillah*, *Hizbullah*, Laskar Tani, Laskar Buruh, Laskar Merah, Laskar Pemuda Rakyat Daerah (PRD) (*Kedaulatan Rakjat*, 21 Mei 1946: 2). Laskar-laskar Surakarta dikoordinir oleh Pusat Laskar Rakyat Daerah Surakarta (*Kedaulatan Rakjat*, 25 Desember 1945: 2), sedang di Yogyakarta dikoordinir oleh Dewan Perjuangan Daerah. Laskar yang berdiri di Surakarta, misalnya Laskar Rakyat Surakarta, Pemuda Laskar Rakyat, Markas pertahanan Rakyat, Gerakan *Sabilillah* (Soeyatno, 1978: 52; Yulianto, 200: 53-58). Laskar-laskar yang ada di Yogyakarta antara lain Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI), Laskar Rakyat, BB, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Keamanan Republik Indonesia (BKRI), Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), *Sabilillah*, *Hisbullah*, Angkatan Muda Kesatuan Republik Indonesia (AMKRI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Laskar Buruh (*Kedaulatan Rakjat*, 6 Mei 1946: 2). Setiap kelaskaran mempunyai bentuk dan gaya tersendiri, seperti Barisan Laskar Banteng (BLB) dengan pakaian seragam hijau di bawah Dr. Moewardi, Pesindo, Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) dan Laskar Rakyat dengan pakaian kuning, Laskar Pelajar, Tentara Pelajar (TP), Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) nama baru

dari Ikatan Putra Tanah Air Sejati (IPTAS) yang telah ada sejak zaman Jepang dan pasukan Legiun Mangkunegaran (Soeyatno, 1978: 51; Yulianto 2000: 58) serta lasykar wanita Indonesia (LASWI) (*Kedaulatan Rakjat*, 8 Juni 1946: 2). Anggota kelaskaran adalah para pemuda dari segala strata.

Organisasi politik dan keagamaan juga membentuk kelaskaran. Sebagai contoh Masyumi telah membentuk "Dewan Perjuangan" (*Kedaulatan Rakjat*, 25 Desember 1945: 1); Organisasi Buruh membentuk laskar Buruh (*Kedaulatan Rakjat*, 6 Juni 1946: 2). Pertahanan-pertahanan lokal di daerah pedesaan juga dilakukan oleh lascar-laskar yang dibentuk pada awal tahun 1946. Anggotanya berasal dari para pemuda desa, tokoh politik, dan pemimpin agama. Namanya juga beraneka ragam, seperti Laskar Rakyat Surakarta, Pemuda Laskar Rakyat, Markas pertahanan Rakyat, Gerakan *Sabillilah*. Perlengkapan dan senjata yang digunakan adalah granggang, tombak, keris, bandil dilengkapi jimat seperti *tanjung Sari*, *kulbuntet*, *bolandoh* semuanya untuk kekebalan dan *kesakten*. (Soeyatno, 1978: 52; Yulianto 2000: 53-58).

Partai politik di Yogyakarta yang hanya bersifat lokal tetapi mempunyai pengikut yang cukup besar dari kalangan petani yaitu Grinda. Partai ini merupakan kebangkitan kembali dari Pakempalan Kawulo Ngayogyakarta (PKN) yang dibekukan pada masa pendudukan Jepang. Grinda dipimpin oleh orang yang sama dengan pendiri PKN yaitu Pangeran Suryadiningrat. Anggota partai Grinda pun dari anggota PKN yang sangat setia, yaitu sebagian besar (90 %) orang-orang miskin di pedesaan yang terpencil dan pendidikan formalnya rendah atau buta huruf latin (Prabawati, 2004): 17). Mereka sangat patuh terhadap pemimpinnya dan dengan aktif mengikuti pertemuan yang sudah lama dilakukan di dalam Suryadiningratan pada setiap hari Kamis malam dan Jumat siang (Prabawati, 2004): 38).

Partai politik lain yang didirikan di Yogyakarta kemudian berkembang dalam

skala nasional adalah Masyumi, Partai Katholik, Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro dan Partai Wanita Rakyat (PWR) (Kementerian Penerangan RI. 1951: 14, 91, 131, 195; Karim. 1953: 78-79). Masyumi bertujuan untuk (1) Menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam, dan (2) Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan (Kementerian Penerangan RI. 1951: 14-15; Karim. 1953: 68-69). Tujuan Partai Katholik adalah bekerja sekuat-kuatnya untuk kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyat (Kementerian Penerangan RI. 1951: 92-94; Karim. 1953: 78-79).

Partai PIR didirikan tanggal 10 Desember 1948 dengan dasar kebangsaan, kerakyatan dan perikemanusiaan. Tujuan partai PIR adalah

- (1) Menjempurnakan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara nasional Indonesia;
- (2) Mewujudkan suatu susunan negara demokrasi yang meliputi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia;
- (3) Mewujudkan keadilan sosial dan perkembangan jiwa budaya menurut bakatnja rakjat sendiri dalam negara dan masyarakat Indonesia;
- (4) Menegakkan kerdja-sama dengan bangsa-bangsa lain terutama dengan bangsa-bangsa yang mempunyai kepentingan amat bertalian dengan bangsa kita, selandjutnja turut serta sama serta memberi sumbangan untuk keselamatan dunia. (Kementerian Penerangan RI. 1951: 131-132; Karim. 1953: 81-82).

PWR didirikan tanggal 6 September 1946 atas inisiatif Ny. Sri Mangunsarkoro, Ny. M.D. Hadiprabowo dan Ny. Sri Umiyati. PWR berasal dari organisasi wanita yang bernama Perwari dan berazas ketuhanan, kebangsaan dan kerakyatan. Tujuannya adalah untuk mencapai susunan masyarakat yang sosialis atas dasar kemanusiaan yang berkebudayaan dan ber-Tuhan. Anggota PWR berasal dari wanita warga negara Indonesia yang sudah berumur 18 tahun dan menyetujui azas dan tujuan PWR. Para pemudi warga negara Indonesia yang berusia 12-17 tahun menjadi calon anggota (Kementerian Penerangan RI. 1951: 195-198; Karim. 1953: 86-87).

Para bangsawan dari Surakarta (Kasunanan) setelah hapusnya swapraja masih menyibukkan diri untuk memperjuangkan statusnya agar sama dengan Yogyakarta, sehingga tidak menunjukkan peran aktif politiknya pada pemilu 1955, walaupun pada masa pergerakan Kasunanan sangat dekat dengan partai yang bersifat massal yaitu Serikat Islam (SI) (Larson, 1990: 66). Organisasi ini kemudian menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) (Kementerian Penerangan RI. 1953: 32-34. Karim. 1953: 74). Para bangsawan Surakarta

PSII bertujuan (1) Membangun umat Islam berdasarkan perintah Alloh dan Rosullulloh dalam berbagai segi kehidupan dalam rangka membangun kekuatan dan kecakapan sebagai upaya untuk menguasai dan menyelamatkan bangsa dan tanah air Indonesia sebagai bagian dari persatuan umat Islam sedunia, dan (2) Menjaga persatuan umat Islam dan golongan lain di Indonesia serta bekerja sama demi pesatuan dan kepentingan bersama (Kementerian Penerangan RI. 1953: 49; Karim. 1953: 74).

Partai lain yang berdiri di Surakarta adalah Partai Indonesia Raya (Parindra) tanggal 25 Desember 1935 dan dibekukan pada masa pendudukan Jepang. Parindra aktif kembali bulan November 1949 dengan azas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Tujuan Parindra adalah (1) Memperkuat kedudukan negara dan bangsa Indonesia; (2) Menyusun kesatuan negara Indonesia yang demokratis; (3) Mencapai masyarakat yang sosialis, dan (4) Mempertinggi kebudayaan nasional (Kementerian Penerangan RI. 1953:149-151).

Mangkunegaran menyambut pemilu 1955 dengan mendirikan partai politik bergambar Kendi dengan menampilkan calon perseorangan yaitu Sarsadi Ario-hudojo yang lebih dikhususkan pada kerabat Mangunegaran. Berdirinya partai politik ini dalam rangka merespons keputusan atas penghapusan kekuasaan swapraja Mangkunegaran dan ingin menunjukkan pada masyarakat Surakarta khususnya dan masyarakat Indonesia pa-

da umumnya bahwa Mangkunegaran tetap eksis. Di samping itu, apabila dalam pemilu 1955 bisa memperoleh kursi baik di DPR maupun Kostituante, Mangkunegaran dapat menyuarakan aspirasinya (*Kedaulatan Rakjat*, 26 September 1955: 2). Partai politik kerabat Mangkunegaran mengembangkan sayapnya dengan membentuk cabang dan ranting-ranting di seluruh wilayah Mangkunegaran, seperti di Wonogiri, Wirata, Kedaung, Nglaroh, Ngawen, Karanganyar, Sukowati Selatan dan Tawangmangu (*Kedaulatan Rakjat*, 26 September 1955: 2).

Partai-partai politik yang berdiri tidak lepas dari rangkaian menyambut pemilu. Pemilu untuk memilih anggota DPRD di Yogyakarta dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli sampai dengan 10 November 1951. Partai politik berkampanye secara kelompok, misalnya Kesatuan Aksi Pemilihan Umum (KAPU) dibentuk oleh Masyumi, Gabungan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Muhammadiyah dan sebagainya; Panitia Kersatuan Aksi Buruh dan Tani (PKABT) dibentuk oleh Serikat Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Partai Sosialis Islam Indonesia (PSII), PKI, Gerakan Wanita Islam (Gerwis), Pemuda Rakyat, Pemuda Muslim. Cara yang dilakukan adalah mendatangi penduduk di desa-desa dengan mengadakan rapat-rapat dan pertemuan (Suwarno, 1994: 287).

Pemilu sebagaimana yang dilakukan di Yogyakarta tidak terjadi di Surakarta. DPRD Surakarta pada tahun 1950-an dibentuk berdasarkan PP No. 39 tahun 1950 tentang pembentukan DPRD Sementara dan Dewan pemerintahannya untuk seluruh daerah Indonesia. PP ini membawa perubahan pada jumlah anggota DPRDS dari 50 orang menjadi 33 orang, terdiri dari : 21 orang anggota menurut ketentuan pasal 1 ayat (1), dan 12 orang menurut ketentuan pasal 5 ayat (4) dan (5) (Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta. 1977: 57). Anggota DPRDS yang berjumlah 33 orang itu terdiri dari: (a) Partai 13 orang berasal dari Masyumi 1, PNI 1, Parkindo 1,

PKRI 1, PIR 1, FDR 1, PSI 1, Partai Rakyat Indonesia 1, Partai Tani 1, Parindra 1, Permei 1, Partai Murba 1, PKS 1, (b) Organisasi 20 orang, terdiri dari Perwari 1, Muslimat 1, Aisyah 1, GPI 4, PGII 1, S.B.I.I 1, PGRI 1, STII 1, Muhammadiyah 2, Pemuda Islam 1, Pemuda Muslim 1, Katholika Wandana 1, Sebda 1. Nahdatul Ulama, Pemuda Katholik, S.B. Kesehatan (Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953: 31)

Perkembangan partai-partai politik di Surakarta dan Yogyakarta sampai memasuki masa pemilu 1955 erat dengan partai-partai di tingkat pusat, di samping partai yang bersifat kedaerahan. Secara keseluruhan terdapat 67 partai/perkumpulan/perseorangan pada pemilu 1955, 63 partai/perkumpulan/perseorangan peserta pemilu DPR dan 59 partai/perkumpulan/perseorangan pada pemilu Konstituante. Terdapat 7 partai/perkumpulan/perseorangan yang menjadi peserta pada pemilu DPR tetapi tidak menjadi peserta pada pemilu Konstituante yaitu Perserikatan Bekas Pegawai Negeri Indonesia (PBPNi), Perserikatan Pensiunan Bumi Putra, M. Prawiro Subroto, Raden Maktal Dipodirdjo, Hadiprebowo, Raden Soedjono Prawirosudarsa, Perserikatan Pensiunan Bumi Putra, sedang pada pemilu Konstituante muncul 3 partai/perkumpulan/perseorangan baru yaitu IKRUPINS, Pak Besud dan Soeparno Darmosarkoro. Nama-nama partai/perkumpulan/perseorangan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran

SIMPULAN

Partai-partai politik di suatu daerah atau negara tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik suatu daerah/negara dan sikap pemimpinya. Kebijakan politik negara yang tidak didukung pemimpin yang demokratis tidak akan memberi peluang semaraknya partai politik, apalagi dalam negara yang memiliki kultur feodal. Revolusi Indonesia yang berpengaruh terhadap nasib daerah yang berkultur feodal kuat yaitu di Surakarta dan Yogyakarta tidak mengakibatkan terjadinya perbedaan atas semaraknya partai politik menjelang

pemilu 1955. Hal ini tidak lepas dari peran figur. Figur masyarakat Yogyakarta yang notabene seorang penguasa feodal tetapi berjiwa demokratis dan mendapat dukungan banyak bangsawan lainnya ternyata tidak berbeda dengan penguasa yang bukan dari kalangan feodal dalam upaya demokratisasi. Sikap demokratis penguasa feodal Yogyakarta tidak melunturkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai orang sakral yang menjadi wakil Tuhan (Wali Alloh) di mata masyarakatnya. Penghormatan dan kegaguman terhadap penguasa Yogyakarta justru makin kuat dan tidak hanya dari masyarakat Yogyakarta melainkan juga dari masyarakat Indonesia bahkan dari masyarakat dunia.

Semaraknya partai politik di Surakarta dan Yogyakarta menyambut pemilu 1955 mencerminkan betapa kuatnya keinginan politisi dan petinggi negara untuk melaksanakan demokrasi, walaupun semua itu belum diimbangi dengan kesiapan pengetahuan masyarakat lapisan bawah (yang jumlahnya lebih besar daripada politisi dan petinggi negara) mengenai demokrasi. Masyarakat pada umumnya masih menunggu dan mengikuti keinginan figurnya. Rakyat Yogyakarta masih sangat patuh dan menghormati serta mengakui kekuasaan elite tradisional, yaitu raja dan para bangwannya sebagai figur, tetapi elite tradisional Yogyakarta sebagai pelopor revolusi tetap konsisten untuk mengikis feodalisme dan mengembangkan demokrasi. Raja sebagai figur tidak memanfaatkan kekuatan pengaruhnya untuk mengarahkan rakyat mengikuti partai politik yang didukungnya, melainkan memberi keleluasaan pada masyarakat untuk mendirikan dan menjadi pengikut suatu partai politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari disertasi pada Ilmu Sejarah Program Studi Ilmu-Ilmu Humaniora. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. Bambang Purwanto selaku promotor dan Prof.

Dr. Suhartono selaku ko-promotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Tsabit Azinar. 2016. "Kampanye dan Pertarungan Politik di Jawa Tengah Menjelang Pemilihan Umum 1955." *Paramita: Historical Studies Journal*, 26 (1): 45-61.
- Anderson, Benedict R,O'G. 1972. *Java in A Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca: Cornell University Press.
- Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 jilid 2, No. 938, tentang Berkas mengenai Pemerintah Swapraja Surakarta, "Lampiran 2, Turunan Surat dari Pakoe Boewono XII kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, tertanggal 15 Januari 1952, ANRI
- Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 jilid 2, No. 906, tentang "Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai Nota tentang daerah Surakarta dan nota tentang Pakuwono XII dan Mangkunegoro", ANRI
- Atmakusumah, (Ed.). 2011. *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Evans, Kevin Raymond. 2003. *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Arise Consultancies.
- Dawam Rahardjo, M. (Ed.). 1996. *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka Cindesindo.
- Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta. 1953. *Kenang-kenangan Kota Besar Surakarta 1945-1953*. Surakarta: Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta.
- Feith, Herbert & lance Castles (Ed.). 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Feith, Herbert and Lance Castles (Eds.). 1970. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca: Cornell University.
- Haryanto. 1991. "Peranan Partai Politik Pada Sistem Politik Indonesia Periode 1945-1959". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Himawan, Riswanda. 1992. "Peranan Organisasi Massa dan Orgnisasi politik". *Prisma*. No. 4 Tahun XXI. Jakrta: LP3ES.
- Karim, M. Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: CV Rajawai.
- Kartodirdjo, Soejatno. 1982. "Revolution in Surakarta 1945-1950: A Case of City and Village in The Indonesian Revolution". Ph.D. *Disertation* in Australian National University, Canberra.
- Kedaulatan Rakjat*, 25 Desember 1945, hlm. 1 dan 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 1 Mei 1946, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 4 Mei 1946, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 6 Mei 1946, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 28 Juni 1946, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 31 Mei 1955, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 1 Juni 1955, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 21 Juni 1955, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 4 Juli 1955, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 14 Juli 1955, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 20 Juli 1955, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 5 September 1955, hlm. 1.
- Kedaulatan Rakjat*, 26 September 1955, hlm. 2.
- Kedaulatan Rakjat*, 27 Oktober 1955, hlm. 3.
- Kementerian Penerangan RI, 1951. *Kepataian di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan Indonesia.
- Larson, George, D. 1990. *Masa Menjelang Revolusi : Kraton Dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*. Terj. A.B. Lopian. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Maswadi, Rauf. 2000. *Konsensus Politik: Sebuah Perjuangan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional.
- Moedjanto, G. 1994. *Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Praja Kejawaen Antara 1755-1992*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muchtarom, Zaini. 1988. *Santri Abangan di Jawa, Jilid II*. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation Islamic Studies (INIS).
- Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta. 1977. *Kenangan Emas 50 Tahun Surakarta*. Surakarta: Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta.
- Poerwantana, P.K. 1994. *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Sardjan, Moh. 1947. *Manifest Politik Partai Politik Islam Masjoemi*. Jakarta: Dewan Pimpinan Partai.
- Sawitri Pri Prabawati. 2004. *Grinda Gerakan Rakyat Indonesia dan Peran Sosial Politiknya di Yogyakarta*. Yogyakarta: Banjar Aji Production.
- Sekretariat Negara. 1981. *30 tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. Jakarta: Sekreariat Negara.

- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1984. *PNI dan Kepolitiikannya 1963-1969*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soemardjan, Selo. 1991. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terj. H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotingi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soenario. 1988. *Banteng Segitiga*. Jakarta: Marinda.
- Soeyatno. 1978. "Feodalisme dan Revolusi di Surakarta". *Prisma* No. 7, Tahun VII. Jakarta : LP3ES.
- Suara Rakjat*, 18 Maret 1955, hlm. 1.
- Suhartono, dkk. 2002. *Yogyakarta Kota Revolusi, Yogyakarta City of The Revolution, Yogyakarta Ibukota Republik, Yogyakarta The Capital of The Republic of Indonesia (4 Januari 1946-27 Desember 1949)*. Yogyakarta: Tim Penulis dan Yayasan Soedjatmoko.
- Sukarno. 1965. *Dibawah Bendera Revolusi I* Cetakan keempat. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Suluh Indonesia*, 24 Agustus 1955, hlm. 1.
- Suratmin, Tashadi, Mulyono dan Poliman. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Sutherland, Heather. 1973. "Notes on Java's Regent Families", Part I, *Indonesia*, No. 16 (October). Cornell Modern Indonesia Project.
- Suwarno, P.J., S.H., 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyatno, 1984. "Masyarakat Daerah dalam Revolusi Indonesia : Aspek Revolusi Sosial dan Revolusi Nasional", *Prisma* No. 8, Tahun XIII. Jakarta: LP3ES.
- Yulianto Ibrahim. 2000. "Kriminalitas di Kota Oposisi: Keresahan Di Surakarta Pada Masa Revolusi (1945-1949):" *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- Wild, Colin dan Peter Carey (Ed.). 1986. *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Nara Sumber**
- Daryono Sutoyo, Prof. Drs., wawancara 9 Desember 2015
- Hadi S Topobroto, Ph.D., wawancara 12 Maret 2014
- Kunto Wibisono Siswo Mihardjo, Prof. Dr., wawancara 3 Januari 2014
- Marselinus Subari, wawancara 25 Februari 2014
- Maryanto, Drs., M.Pd., wawancara 6 September 2014
- RM Tirun Marwito SH/Pangeran Jatiningrat, 24 Desember 2013
- Sapuan Gafar, Dr., wawancara 21 September 2014
- Setyo Mahanani, Drs., wawancara 21 Desember 2013
- Slamet Mulyono, wawancara 13 Maret 2014
- Sri Sudarni, Dra., wawancara 4 Desember 2013
- Suhardi, wawancara 7 Januari 2014
- Sutantiyo, Drs., M.M., wawancara 2 September 2014
- Suwito, P.H., Drs., wawancara 30 Desember 2013
- Warkitri, Prof. Dra, wawancara 30 November 2013

Lampiran

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Untuk DIY dan Jawa Tengah Pada Pemilu 1955.

No	Nama Daftar/Partai/Perseorangan	Perseorangan
	Partai Politik Berideologi Kebangsaan Tingkat Nasional	1 R. Suroto
1	Partai SKI	2 Sumantri
2	Persatuan Indonesia Raya (PIR)	3 M. Prawiro Subroto*
3	PARINDRA	4 Mayor Mr. Rd. Moehono Sastrodiprojo
4	Partai Rakyat Indonesia	5 Jp. Snel
5	Partai Kebangsaan Indonesia (Perki)	6 Siswoatmodjo Alias Pak Sis
6	Partai Rakyat Nasional (PRN)	7 Sarsadi Ariobudojo, dkk
7	PNI	8 Siswoto
8	Partai Wanita Rakyat	9 M. Soedirowijoto
9	Perserikatan Bekas Pegawai Negeri Indonesia (PBPNI)+	10 Hubertus Soejono Soerjopradigdo
10	Partai Republik	11 Raden Maktal Dipodirdjo*
11	Pensiunan	12 Djakartirtana
12	Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia	13 R. Suradjiman
13	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	14 Hadiprebowo*
14	Gerakan Pembela Pancasila	15 Notokusumo
15	Partai PERMAI (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia)	16 R.R . Margodihardjo
16	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	17 Raden Soedjono Prawirosudarso*
17	Komite Pemilih Rakyat Seluruh Indonesia	18 J. Wirowihardjo
18	Gerakan Banteng RI	19 Pak Darso
19	IKRUPINS**	20 N.J.S. Tjokroatmadja
	Partai Politik Berideologi Keagamaan Tingkat Nasional	21 Pak Besud**
1	Parkindo	22 Soeparno Darmosarkoro**
2	Partai Islam PERTI	Etnis
3	Masyumi	1 Baperki
4	Partai Politik Tarekat Islam (PPTI)	
5	Partai Nahdatul Ulama (NU)	*) Menjadi peserta pada pemilu DPR tetapi tidak menjadi peserta pada pemilu Konstituante
6	Partai Katolik	***) Tidak menjadi peserta pada pemilu DPR tetapi menjadi peserta pada pemilu Konstituante
7	Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)	
8	Angkatan Baru Indonesia	
	Partai Politik Berideologi Komunis Tingkat Nasional	
1	Murba Pembela Pancasila	Sumber: Diolah dari <i>Berita Negara Republik Indonesia</i> , No. 63a, tanggal 6 Agustus 1954, hlm. 964-979 dan No 60a, tanggal 3 Juli 1955, hlm. 1058-1071.
2	Partai Sosialis Indonesia	
3	Partai Buruh	
4	Partai Acoma	
5	PKI dan orang tak berpartai	
6	Tani Makmur	
7	Centraal comite Pemuda Negara	
	Partai Politik Kedaerahan	
1	Raja Keprabon	
2	Kumpulan Pemilih Bulan Bintang	
3	Grinda	
4	Persatuan Indonesia Nasional	
5	Serikat Buruh Kepenjaraan Basis Semarang*	
6	Himpunan Kemanusiaan	
7	Perserikatan Pensiunan Bumi Putra*	
8	Akui	
9	Front Bebas	